

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Atmosudirdjo, P., *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Cahyawati Dwi Putri, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012.
- Citranum. *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktik*, Jakarta : PT Sonpedia publishing Indonesia, 2023.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta : UNY Press, 2011.
- Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan adat Aceh*, Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan, 2013.
- Fendri Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2023.
- Furchan, A. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Gaol, Nasib Tua Lumban. *Teori dan Model Manajemen Pendidikan: Sebuah Kajian Fundamental*. Jakarta : PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Kusuma, M.H., *Pembaharuan kewenangan*, Bandung: PT Alumni, 2019.
- Malahayati. *Otonomi Khusus dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala, 2015.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nahot Tua Suherimiko dkk, *Optimalisasi Fungsi Dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Menyelenggarakan otonomi Daerah*. Surabaya: Scopondo Media Pustaka, 2023.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.
- Nurgiansah, T, H., *Metode Penelitian*, Bandung : UPI Press, 2018.
- Primanto Aji. *Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia*, Jawa Tengah: CV. ZT Corpora, 2023.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum. Edisi Cet. Ke-15*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Walidin Warul. *Filosofi Semeubeut Dalam Budaya Aceh*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2019.
- Wijaya Agus, *Kewenangan Membangun Konektivitas Transpormasi*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022.

B. Tesis/Jurnal Ilmiah

- Amirul Haq RD. *Implementasi Kebijakan Kekhususan Pendidikan Aceh*. Tesis. Yogyakarta : UIN SUKA, 2022.
- Azmi, R. H. Peran Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengembangkan Sistem Pendidikan Yang Islami Di Pemeritahan Kabupaten Aceh Tenggara (Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2006), *Doctoral dissertation*, Medan : UMSU, 2020.
- Cut Meutia, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei. Implikasi Hukum Terkait Pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No 1 (2017).
- Cut Mutia, *implementasi tugas dan fungsi majelis pendidikan daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintah aceh dalam bidang pendidikan*. Tesis. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017.

- Dwitawati, I. Implementasi Gap Analisis Dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kabupaten Bener Meriah. *JINTECH: Journal of Information Technology*, Vol. 3, No. 1, Februari 2022, Hal : 1 – 9.
- Hartato Hasim. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Tenggara (konawe). *Jurnal Ius Civile* : Vol 5, No 1, April 2021.
- Iswati. Transformasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Nilai Karakter Peserta Didik Yang Humanis Religius. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, (Vol.3 No.1). 2017.
- Irfan Iryadi, Pendidikan untuk Semua dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 2, Agustus 2016.
- M. Shabri Abd. Madjid, Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh, *Jurnal Pencerahan*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Mukhlis. Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* : Volume 4 NO. 1, 2010.
- Munadi, D. Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Dalam Menyelenggarakan Cadangan Pangan Di Kabupaten Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 (*Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan*). Bandung : UNPAS, 2022.
- Mutia Jawaz Muslim. Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata. *JFJ (Jurnal Fundamental Justice)* : Volume | 1 | Nomor 1|April 2020.
- Safrida, Nila. Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat. *Publikuma (Jurnal Ilmu Administrasi Public UMA)*. 9 (2), 2021. 71-80
- Saiful Bahri, Cut Intan Hayati. Upaya Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengwujudkan Mutu Pendidikan Islam di Kota Lhokseumawe. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, VOL: 12/NO: 02 Mei 2023.

- Sitorus Junianto. Pelaksanaan manajemen pada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatra Utara, *Tesis. Medan* : Pascasarjana UIN-SU, 2017.
- Suharyo. Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* : Vol 18, No 3 (2018).
- Suswantoro, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus* : Vol 1 No 1 (2018).
- STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh. Meningkatkan Professionalisme Pendidik melalui Proses Penelitian yang Berkelanjutan dalam Membentuk Peserta Didik Cemerlang Menuju Indonesia Emas 2045. *Prosiding. Seminar nasional pendidikan dasar*, 2018.
- Trio panuntun. Analisis implikasi qanun peruweren terhadap kelestarian fungsi strategis peternakan tradisional di kabupaten bener meriah. *Skripsi*. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar - Raniry, 2023.
- Zulkarnein, S., Yusrizal, Y., & Niswanto, N. Kontribusi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya Dalam Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Visipena*, 11 (2), 2020. 316-333 .

C. Web/Sumber Lain

- Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Peran Majelis Pendidikan Daerah (MPD).<https://ppid.benermeriahkab.go.id/inpub/?ppid=all&klasif=all&urut=pd&keyword=Mpd>
- Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bener Meriah.

<https://jdih.benermeriahkab.go.id/dih/detail/da325a35-3061-4ffe-a5a5-f1c2577e7c7c>

Antara Aceh “MPD Memiliki Tugas Seluruh Masyarakat Aceh “ diakses dari <https://aceh.antaranews.com/berita/96118/mpd-miliki-tugas-cerdaskan-seluruh-masyarakat-aceh> dikutip pada tanggal 2 Mei 2024 pada waktu 13:30.

SIGAP. Sejarah Kabupaten Bener Meriah. Diakses pada 17 Mei 2024 di <https://benermeriah.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>

D. Peraturan Perundang-undangan

Qanun Kasbupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (Mpd) Kabupaten Bener Meriah. <https://jdih.benermeriahkab.go.id>

Qanun MPD Nomor 3 tahun 2006. Susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh